BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Relasi Kuasa Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Politik Pasca-Reformasi

Sebagaimana dituturkan di muka (baca : latar belakang masalah) dalam penelitian ini akan memotret dua relasi kuasa antara NU Jawa Timur dan politik pasca-reformasi. Relasi kuasa tersebut yakni antara NU Jawa Timur dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2004 dan relasi antara NU Jawa Timur dengan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2014.[1]

1. Pilpres 2004

Pilpres tahun 2004 menjadi pilpres pertama yang dilaksanakan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia nomor 36/2004 bahwa lima pasangan disahkan menjadi kandidat dalam pertarungan meraih kursi presiden dan

[1]Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang, berkenaan dengan penelitian ini, dua relasi NU Jawa Timur dengan pilpres 2004 dan NU Jawa Timur dengan pileg 2014 akan ditelaah lebih lanjut. Penekanan pada dua relasi ini berdasar pada beberapa alasan. Pertama, pilpres 2004 menempatkan NU pada posisi dilema. Di satu sisi Ketua Tanfidziah PBNU non-aktif, Kiai Hasyim Muzadi tampil menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Megawati, di sisi lain, cucu *Hadratussyaikh* Hasyim Asy'ari (pendiri NU), Kiai Salahuddin Wahid (Gus Sholah) tampil menjadi cawapres mendampingi Wiranto. Kedua, pilpres tahun 2004 menjadi pemilihan presiden pertama setelah "presiden NU", Gus Dur, jatuh dari kursi kepresidenan. Ketiga, pilpres 2004 menjadi pilpres pertama yang langsung dipilih oleh rakyat. Tiga alasan ini akan menjadi pijakan untuk membaca kondisi politik di internal NU, tepatnya dalam kaitan dengan relasi antara NU Jawa Timur dan politik. Termasuk sejauh mana penggunaan sumber daya NU di tengah kebebasan politik (pasca-reformasi) dan bagaimana peran NU Jawa Timur dalam konstelasi politik. Sementara pada pileg (DPD) tahun 2014 beralasan, pertama, lahirnya relasi antara NU Jawa Timur dengan politik secara institusi (relasi secara institusi ini tidak terlihat pada pileg (DPR dan DPRD) dan pilpres 2014). Kedua, menjadi pemilihan terakhir pasca-reformasi yang akan menjadi indikator posisi NU Jawa Timur dan konstelasi politik. Ketiga, menjadi titik tolak prospek relasi NU Jawa Timur dan politik kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil presiden. Lima pasangan tersebut adalah Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.[2]

Pada pilpres 2004 tersebut hampir di semua pasangan calon terdapat "perwakilan dari unsur NU". Di kandidat nomor urut satu ada Salahuddin Wahid. Di kandidat nomor urut dua ada Hasyim Muzadi. Nomor urut empat ada Jusuf Kalla, sementara pada pasangan nomor urut lima ada Hamzah Haz.

Secara berurutan, "unsur NU" dari setiap kandidat tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) adalah cucu pendiri NU, *Hadratussyaikh* Hasyim Asy'ari. Ia juga adik kandung dari Gus Dur. Tatkala mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, ia berstatus sebagai Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) non aktif (masa khidmah 1999-2004).[3]

Sementara Hasyim Muzadi (Kiai Hasyim) ketika mendampingi Megawati, berstatus sebagai Ketua Umum Tanfidziah PBNU non aktif (masa khidmah 1999-2004). Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur (masa khidmah 1990-1992), dan Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur (masa khidmah 1992-1997 dan 1997-2002 (terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziah PBNU pada 1999). Sebelumnya ia juga tercatat pernah menjadi pengurus NU di Malang, mulai dari ranting, Pimpinan Anak Cabang (PAC), dan Ketua Pengurus Cabang (PC) Malang.[4]

---

[2]Tempo, "Lima Pasangan Capres Cawapres Jadi Peserta Pemilu 2004" dalam http://nasional.tempo.co/read/news/2004/05/22/05542842/lima-pasangan-capres-cawapres-jadi-peserta-pemilu-2004 (Rabu, 09 Nopember 2016, 20.09)
[3]Majalah Langitan, "Biografi Ir. KH. Salahudin Wahid" http://majalahlangitan.com/berkarya-untuk-bangsa-biografi-ir-kh-salahudin-wahid/ (Rabu, 09 Nopember 2016, 20.17)
[4]Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Panggung Pemilu*... 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kandidat lain, Jusuf Kalla, pernah menjabat sebagai Mustasyar (penasihat) PWNU Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Jusuf Kalla tidaklah asing di kalangan NU, sebab ayahnya H. Kalla merupakan salah seorang perintis NU di Provinsi Sulawesi Selatan.[5]

Terakhir, Hamzah Haz, adalah tokoh yang pernah menjabat sebagai wakil ketua PWNU Kalimantan Barat pada rentan waktu 1970-1982. Selain pula pernah menjabat Mustasyar PWNU Kalimantan Barat pada tahun 1982. Di sisi lain, kendaraan politik yang digunakan Hamzah Haz adalah PPP, partai yang juga dekat dengan kalangan NU.[6]

Adanya kandidat dari unsur NU di hampir semua calon meniscayakan adanya perebutan pengaruh di kantong-kantong NU. Tidak absen Jawa Timur, sebagai tempat lahir NU. Sebagai kepengurusan (tertinggi) di tingkat provinsi, tentu dalam hal ini NU Jawa Timur mempunyai daya tawar yang cukup tinggi dalam hiruk pikuk pilpres 2004. Apalagi Jawa Timur adalah basis nahdliyyin (sebutan bagi warga NU). Pun sejumlah kiai khos NU yang turut mewarnai gelanggang politik nasional juga tidak sedikit dari Jawa Timur.

Dari beragam "upaya pendekatan" dengan NU Jawa Timur itu, kedekatan pasangan Mega-Hasyim adalah paling kentara. Dalam pandangan peneliti, relasi antara NU Jawa Timur dan pasangan Mega-Hasyim inilah yang menjadi representasi hubungan NU Jawa Timur dan pilpres 2004. Nampak ada kecenderungan NU Jawa Timur ke salah satu pasangan calon.

---

[5]NU Online, "Jusuf Kall a dan Fauzi Bowo Mustasyar PBNU" dalam http://www.nu.or.id/post/read/22527/jusuf-kalla-amp8211-fauzi-bowo-mustasyar-pbnu (Rabu, 09 Nopember 2016, 20.41)

[6]Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Panggung Pemilu*... 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa turut kontestasinya elit keagamaan dalam pilpres 2004 meniscayakan keterlibatan elit lain yang turut menyemai pengaruh dan memberikan dukungan. Apalagi setiap kandidat pernah tercatat sebagai tokoh struktural di kepengurusan NU. Tentu, sumber daya yang dimiliki kandidat akan dimaksimalkan sebab akan menentukan sejauh mana keterlibatan para kiai atas pencalonannya.[7] Keterlibatan kiai memang beragam, bahkan tidak menutup kemungkinan kiai yang duduk di jajaran struktural dapat menjadi tim sukses dan juga juru kampanye.

Terkait bentuk relasi pasangan Mega-Hasyim dengan PWNU Jawa Timur terlihat dari berperannya kiai struktural dalam suksesi pencalonan pasangan ini. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur, Kiai Ali Maschan Moesa, tatkala mengomentari dinamika politik menjelang pilpres. Kala itu Kiai Hasyim belum dipinang oleh partai politik manapun.

> "Kita sudah punya rumah tangga sendiri-sendiri tentang hal itu. Jadi kalau ada pinangan dari Pak Wiranto atau Bu Mega, ya silahkan. Pak Hasyim tinggal memilihnya".[8]

Pengupayaan agar Kiai Hasyim dapat dipinang berlanjut pada Halaqah Nasional Alim Ulama di Surabaya pada 26-27 April 2004. Meskipun secara eksplisit, Kiai Ali Maschan tidak menyebut forum itu sebagai upaya penggalangan kekuatan dan konsolidasi pencalonan Kiai Hasyim, namun tidak bisa dipungkiri forum itu menjadi jembatan atas terbentuknya duet Mega-Hasyim. Halaqah ini berperan penting dalam rangkaian perjalanan hingga terbentuk pasangan calon sebagai kontestan pilpres 2004. Terbukti, sekitar seminggu setelah halaqah, di

---

[7]Ibid., 100.
[8]Ibid., 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jakarta, pada 6 Mei 2004 dideklarasikan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.[9]

Paling tidak ada dua alasan lain yang dapat menunjang tesis ini. Pertama, sebagaimana dituturkan Rofiq, melalui Kiai Ali Maschan para peserta melegitimasi atas pencalonan Kiai Hasyim sebagai cawapres. Kala itu Kiai Ali Maschan bertanya kepada peserta, apakah mereka mengizinkan Kiai Hasyim maju menjadi cawapres. Merespon ucapan Kiai Ali Maschan para peserta mengizinkan Kiai Hasyim menjadi cawapres, bahkan mempersilahkan untuk memilih pasangannya.[10]

Kedua, dalam halaqah tersebut juga terjadi pertemuan khusus dan tertutup antara Megawati Soekarnoputri, Kiai Hasyim, dan beberapa kiai struktural PWNU Jawa Timur. Diantara kiai struktural itu adalah Kiai Masduqi Mahfudz (Rais Syuriah PWNU Jawa Timur), Kiai Miftahul Akhyar (Syuriah PWNU Jawa Timur), Kiai Ali Maschan Moesa (Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur) Kiai Mutawakkil Alallah (Wakil Ketua PWNU Jawa Timur) dan kiai masyhur lain seperti Kiai Muchit Muzadi (Jember), Kiai Idris Marzuki (Kediri), Kiai Mas Subadar (Pasuruan) dan Kiai Fawaid As'ad Arifin (Situbondo).[11]

Pasca-resmi menjadi pasangan calon, dukungan kiai-kiai NU Jawa Timur juga terus mengalir ke duet Mega-Hasyim. Bahkan Rais Syuriah PWNU Jawa Timur dan Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur menjadi ikon penting atas dukungan ini. Selain dua tokoh struktural itu, tokoh struktural lain adalah Wakil Ketua Tanfidziah, Kiai Mutawakkil Alallah. Sebagaimana dilansir *Tempo*, Kiai

---

[9]Ibid., 122.
[10]MH. Rofiq, *NU dan Ambisi Kekuasaan* (Surabaya: LKP PW GP Ansor Jawa Timur, 2004), 50.
[11]Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Panggung Pemilu*...122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutawakkil adalah tokoh yang mendapat tugas menggarap warga NU Jawa Timur untuk kemenangan pasangan Mega-Hasyim.[12] Dalam sebuah kesempatan, di mana Kiai Mutawakkil menjadi koordinator acara, ia mengungkapkan bahwa acara yang dikomandoi itu merupakan sarana meraih dukungan dari kiai NU di wilayah tapal kuda Jawa Timur dan juga di mataraman untuk kemenangan pasangan Mega-Hasyim.[13]

Upaya penggalangan dukungan oleh kiai struktural ini, terwujud dengan turut andilnya kiai-kiai lain dalam pemenangan Mega-Hasyim. Di antaranya Kiai Zainuddin Jazuli yang menegaskan bahwa santri yang tidak mendukung Mega-Hasyim adalah murtad.[14] Atau Kiai Nawawi Abdul Djalil yang membagikan tulisan tangan "Setelah melihat calon presiden dan wakil presiden, setelah saya amati dengan seksama, saya memberikan dukungan kepada KH. Hasyim Muzadi sebagai wakil presiden Ibu Megawati".[15]

Tak jauh berbeda, sebagaimana dilansir *Detik,* pada 06 Mei 2004.[16] melalui sambungan telepon ada kesan tak terbantahkan Kiai Ali Maschan Moesa mendukung Kiai Hasyim. Saat diwawancarai terkait pencalonan Kiai Hasyim, Kiai Ali Maschan menuturkan:

> "Pak Hasyim kan berangkat dari Jatim dan dari bawah. Dia juga punya basis akar rumput. Saya perkirakan, minimal 70 persen suara warga NU Jatim akan ke Pak Hasyim. Sisanya 30 persen semburat kemana-mana. Sedangkan para ulama Jatim saya kira bisa memahami majunya Pak Hasyim".

---

[12]Majalah Tempo, 13 Juni 2004, 27.
[13]Majalah Tempo, 20 Juni 2004, 33.
[14]Majalah Tempo, 13 Juni 2004, 27.
[15]Majalah Tempo, 20 Juni 2004, 32.
[16]Detik, "PWNU jatim: Hasyim Hanya Harus Non-Aktif Saat Kampane" http://news.detik.com/berita/155641/pwnu-jatim-hasyim-hanya-harus-nonaktif-saat-kampanye (Rabu, 09 Nopember 2016, 21.08)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tatkala diminta komentar terkait pencalonan Gus Sholah, Kiai Ali Maschan menyatakan kandidat yang berpasangan dengan Wiranto ini akan mendapat semburat 30 persen. Itu pun tidak semuanya, sebab harus bersaing dengan kandidat lain.

Tak bisa dipungkiri majunya Kiai Hasyim dalam gelanggang pilpres 2004 (yang pada saat itu berstatus Ketua Tanfidziah PBNU non-aktif) menjadikan NU tersesert-seret mendukung Kiai Hasyim. Hal ini tidak dipungkiri telah memunculkan bias. Ini sebagaimana dituturkan Kiai Ali Maschan, yang menyebut meskipun dukungan yang muncul dari ulama adalah dukungan pribadi, tidak atas nama NU.[17]

Meskipun demikian, hadirnya PWNU Jawa Timur harus diakui memberikan pengaruh kepada Pimpinan Cabang (PC) NU di Jawa Timur. Sebagaimana dilansir *Surya* bahwa dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PWNU Jawa Timur dengan PCNU se-Jawa Timur hampir semua PCNU di Jawa Timur memberikan dukungan kepada Kiai Hasyim. Di antara alasannya Kiai Hasyim dinilai lebih dapat dipercaya membawa aspirasi NU.[18]

Keterlibatan PWNU Jatim di panggung kontestasi pilpres 2004 bisa dibaca merupakan kelanjutan dari pertemuan sebanyak 19 PWNU dan sejumlah Badan Otonom (Banom)[19] NU yang diinisiai Kiai Hasyim. Pertemuan yang dilangsungkan setahun sebelum pilpres ini disebut-sebut sebagai manuver Kiai Hasyim menjelang pilpres 2004. Pada Agustus 2003 beberapa kiai ternama

---

[17]Kiai Ali Maschan, *Wawancara*, Surabaya, 17 September 2016

[18]Surya, 21 Mei 2004; Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Panggung Politik*...131

[19]Banom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lihat Anggaran Rumah Tangga NU Bab V Pasal 20. Tim Revisi POA PWNU Jawa Timur, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur* (Surabaya: PW LTNNU Jatim, 2015), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkumpul di antaranya Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Fachruddin Masturo, Kiai Musthafa Bisri, Kiai Muchit Muzadi, Kiai Idris Marzuki dan Kiai Abdurrahman Chudhari.[20]

Dalam pertemuan tersebut, keputusan penting diambil berupa mendukung Kiai Hasyim sebagai presiden. Keputusan tersebut juga dinyatakan secara terbuka oleh Andi Muawiyah Ramli. Ada dua keputusan penting dari pertemuan tersebut.[21] Pertama, pencalonan Kiai Hasyim diupayakan melalui PKB. Sebagai bagian dari upaya ini maka pertemuan tersebut memberi rekomendasi kepada PBNU agar mengundang PKB sekaligus meminta PKB mencalonkan Kiai Hasyim sebagai calon presiden. Kedua, jika PKB menolak mencalonkan Kiai Hasyim maka melalui PBNU Kiai Hasyim diberi mandat agar melakukan dialog dengan pihak lain agar bisa dicalonkan.

Dinamika yang terjadi, dan pemaksimalan dukungan yang diberikan kepada pasangan Mega-Hasyim berbuah lolosnya pasangan Mega-Hasyim ke putaran kedua pilpres 2004. Menyikapi hal ini, langkah cukup tegas pula diambil Kiai Masduqi Mahfudz (Rais Syuriah PWNU Jawa Timur). Kiai Masduqi mengkoordinir 29 kiai untuk berangkat ke Makkah guna menemui salah seorang ulama besar Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki.[22] Keberangkatan para kiai ini guna mendapat kejelasan tentang keabsahan pemimpin perempuan. Ketika Sayyid Muhammad memberikan penjelasan bahwa tidak menjadi persoalan

---

[20]Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Panggung Pemilu*...105
[21]MH. Rofiq, *NU dan Ambisi Kekuasaan*... 25-26.
[22]Sayyid Muhammad adalah ulama sunni Makkah yang memilik banyak murid di Indonesia. Lihat NU Online "Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki Meninggal Dunia" http://www.nu.or.id/post/read/2303/sayyid-muhammad-alwi-al-maliki-meninggal-dunia (Senin,14 Nopember 2016, 08.27)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perempuan menjadi presiden, maka para kiai ini membuat "Deklarasi Madinah".[23]

Deklarasi ini berisi seruan untuk memilih pasangan Mega-Hasyim dalam pilpres 2004. Secara utuh "Deklarasi Madinah" berbunyi :

> Seruan Ulama Pengasuh Pondok Pesantren
> *Bismillahirrahmanirrahim*
>
> Atas berkat rahmat Allah SWT dan didorong niat luhur terhadap tanggung jawab kebangsaan, kami para Kyai Pengasuh Pondok Pesantren setelah mencermati secara jernih perkembangan pemilihan presiden RI putaran kedua dan setelah mendapat saran rohani dari ulama besar Hijaz, maka kami menyerukan:
>
> 1. Para Pemimpin NU struktur maupun kultur senantiasa meningkatkan ikhtiar perjuangan di segala bidang, dengan mengedepankan ukhuwah dan akhlaqul karimah untuk kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia.
> 2. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah Khilafah, Imamatul Udzma, wilayah ammah atau imaroh, tetapi ri'asah/ wilayah khossoh yang boleh dalam kajian hukum Islam.
> 3. Aspirasi umat Islam dan warga bangsa khususnya warga NU yang mempunyai hak pilih diserukan menentukan pilihan kepada Hj. Megawati Soekarnoputri-KH. A. Hasyim Muzadi, sebab keduanya mempunyai komitmen NU-Islam-Kebangsaan yang kuat demi tegaknya Indonesia bermartabat dan mandiri jauh dari intervensi bangsa asing.
>
> Semoga Allah SWT meridloi dan memudahkan segala ikhtiar perjuangan kita. Amin.
>
> Seruan ditetapkan di Madinah Al-Munawaroh
> 24 Jumadil Akhir 1425 / 11 Agustus 2004

Pada bagian bawah deklarasi tersebut (setelah tanggal deklarasi) terdapat kalimat "Kami yang Menyerukan" diikuti nama lengkap penandatangan, nama pesantren dan alamat. Tertanda 25 kiai yang membubuhkan tanda tangannya sebagai pembuktian seruan. Di antaranya Kiai Masduki Mahfudz-Pondok Pesantren (PP) Nurul Huda (Malang), Kiai Idris Marzuki-PP Lirboyo (Kediri), Kiai Zainuddin Jazuli-PP Al-Falah (Kediri), Kiai Agus Ali Masyhuri-PP Bumi Sholawat (Sidoarjo), Kiai Abdul Ghofur-PP Sunan Drajat (Lamongan) dan Kiai A. Hisyam Syafaat-PP Darussalam (Banyuwangi).

[23]Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Panggung Pemilu*... 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditilik lebih jauh, majunya Megawati sebagai capres memang hangat diperbincangkan dalam kerangka Islam-Indonesia. Maksudnya, calon pemimpin perempuan dalam berbagai kesempatan memang acapkali mendapati sebuah pernyataan dalil baik dari al-Qur'an maupun Hadits tentang keabsahan seorang perempuan menjadi pemimpin. Maka bukanlah hal aneh saat ada kelompok yang menyatakan haram memilih perempuan sebagai pemimpin maupun Islam memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Bahkan keduanya tidak menutup kemungkinan muncul dari kalangan NU.

Kemunculan deklarasi di atas bisa dibaca sebagai sebuah strategi politik kiai pendukung Mega-Hasyim. Lolosnya Mega-Hasyim ke putaran kedua pilpres 2004, tentu perlu upaya penuh untuk menggaet pemilih di putaran pertama yang berpotensi terpengaruh fatwa pemimpin perempuan haram.[24] Sebuah upaya untuk meyakinkan kepada khalayak bahwa para ulama memberikan lampu hijau kepada perempuan untuk menjadi pemimpin negara.

Pemilihan tokoh Sayyid Muhammad sebagai rujukan, juga menarik sebab Sayyid Muhammad adalah tokoh Sunni yang sangat disegani di Indonesia. Tidak sedikit, kiai-kiai NU yang juga murid Sayyid Muhammad. Mencermati deklarasi yang dimotori kiai struktural NU Jawa Timur semakin meneguhkan betapa peran para kiai NU Jawa Timur dalam kontestasi yang diarungi Mega-Hasyim.

Keterlibatan ini semakin kentara, tatkala *Tempo* melansir berita tentang basis NU Jawa Timur yang akan digarap serius pada pilpres putaran II oleh tim pemenangan Mega-Hasyim. Menyitit pendapat Ketua Tanfidziah PWNU Jawa

[24]Menjelang pilpres 2004 terjadi polemik tentang keabsahan pemimpin perempuan. Bahkan muncul fatwa yang berbeda atas hal ini. Satu pihak absah pemimpin perempuan, satu pihak haram pemimpin perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur, Kiai Ali Maschan bahwa (di putaran II) warga NU akan berbondong-bondong memilih pasangan Mega-Hasyim.[25] Hal tak jauh beda, saat Kiai Ali Maschan secara langsung menuturkan penjelasan terkait kenetralan PWNU Jawa Timur dalam pilpres 2004.[26]

> "...cuma kita tidak secara formal atas nama NU. Memang ndak boleh. Atas nama pribadi. Tapi walaupun begitu ya memang ada sisi-sisi yang dinilai orang lain kurang netral otomatis. Tapi alhamdulillahnya, kita tidak pernah pakai stempel. Ndak, atas nama pribadi. Itulah resikonya kalau agak mulai mendekat dengan aktifitas politik praktis jadinya seperti itu. Jadi menjadi pelajaran juga".

Hal lain yang turut menunjang tesis relasi ini adalah *content* Majalah *AULA* (Majalah resmi yang dikeluarkan PWNU Jawa Timur) edisi No. 07 Tahun XXVI Juli 2004. Mengusung judul besar Ancaman *Ukhuwwah Nahdliyah* memberikan banyak ruang yang membahas konstelasi pilpres 2004. Dari ruang tersebut sebagian besar –jika tidak disebut semuanya– mengarah kepada pemberian dukungan ke Mega-Hasyim.

Ada beberapa rubrik yang bisa "dibaca" sebagai dukungan kepada pasangan Mega-Hasyim. Dalam rubrik *Surat Pembaca* terdapat 7 surat pembaca. Dari 7 surat pembaca tersebut ada 4 surat yang mengarah ke dukungan kepada Mega-Hasyim.[27]

Pertama surat berjudul *Menguji Keotentikan Fatwa Gender* yang berisi tidak tepatnya justifikasi beberapa dalil untuk masalah kepemimpinan perempuan. Bahkan disebut adanya pengharaman kepada perempuan untuk menjadi pemimpin sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an secara universal, keadilan dan kesetaraan. Kedua, surat dengan judul *Selamat dan Sukses* yang berisi ucapan

---

[25]Majalah Tempo, 18 Juli 2004, 35.
[26]Kiai Ali Maschan Moesa, *Wawancara*, Surabaya, 17 September 2016.
[27]Majalah *AULA* edisi No. 07 Tahun XXVI Juli 2004, 4-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamat kepada Hasyim Muzadi yang menjadi calon wakil presiden. Dalam surat tersebut juga tertulis:

> "[M]enurut keorganisasian apa saja warga nahdliyyin sebaiknya memilih KH. Hasyim Muzadi karena beliau Ketua Umum NU, jika orang NU suaranya kocar-kacir tentunya memberi peluang orde baru unggul lagi. Maaf ini bukan urusan partai, urusan citra NU sendiri".

Ketiga, surat berjudul *Siapa di Balik Fatwa Presiden Perempuan Haram* yang berisi protes, mempertanyakan apa yang melatarbelakangi ulama mengeluarkan fatwa presiden perempuan haram. Padahal Megawati masih dalam masa menjabat sebagai presiden, dan kini mencalonkan diri lagi. Keempat, surat dengan judul *Siapa Lagi Bapak Demokrasi Kita* yang berisi kritikan kepada Gus Dur yang dinilai bersikap tidak elok pasca-pengumuman Gus Dur dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagai calon presiden. Penulis surat ini juga menuturkan betapa marahnya Gus Dur tatkala mengetahui Hasyim maju mendampingi Megawati.

Tidak hanya itu, di rubrik lain juga terdapat tulisan dengan nada sama (baca: mendukung Mega-Hasyim). Rubrik tersebut adalah Mimbar Aula dengan judul *Pemimpin dalam Islam,*[28] rubrik Dirosah dengan judul *Kriteria Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Versi Fiqih Terapan,*[29] rubrik Wawasan dengan tulisan berjudul *Kalkulasi Mengapa Pilih Mega-Hasyim*[30] dan rubrik An nisak dengan tulisan berjudul *Presiden Perempuan dalam Islam.*[31] Selain pula terdapat resensi buku tentang kiprah kepemimpinan Hasyim Muzadi dengan judul *Suksesi Demokratis NU.*[32]

---

[28]Ibid., 53.
[29]Ibid.,71
[30]Ibid., 78.
[31]Ibid., 84.
[32] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku yang diresensi tersebut adalah buku karya M. Shodiq dengan judul *Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan KH Hasyim Muzadi* yang terbit pertama kali pada April 2004. Terakhir, poster Mega-Hasyim *full colour* di sampul luar belakang dan sampul dalam depan majalah juga tak bisa serta merta diabaikan. Majalah *AULA* edisi No. 07 Tahun XXVI Juli 2004 ini semakin menegaskan bahwa NU Jawa Timur punya relasi kuat dengan pasangan Mega-Hasyim. Sebab bagaimanapun, Majalah *AULA* adalah majalah resmi yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur.

Pada posisi ini, meski diakui tidak berperannya institusi, tapi pada tataran realitas tidak bisa dipungkiri bahwa berperannya kiai struktural menjadi representasi institusi itu sendiri. Pemaksimalan sumber daya NU yang dimiliki melalui organ struktural organisasi, menegaskan bentuk relasi ini.

2. Pileg DPD 2014

Selain relasi dengan pasangan Mega-Hasyim pada pilpres 2004, NU Jawa Timur juga lekat dengan calon anggota DPD pada pileg tahun 2014. Calon anggota DPD yang dimaksud adalah lima calon anggota yang mendapat rekomendasi oleh PWNU Jawa Timur untuk turut berkontestasi dalam pileg tahun 2014.

Sebagaimana dilansir oleh situr resmi NU, ada lima calon anggota DPD yang mendapat rekomendasi dari PWNU Jawa Timur. Lima calon itu yakni Kiai Hasib Wahab, Ainul Yakin, Istibsjarah, Dwi Astutik, dan Khodijatul Qodriah.[33]

[33]NU Online, "ISNU Jatim Ajak PMII Ajak Kawal Pemilu" dalam http://ww.nu.or.id/post/read/50771/isnu-jatim-ajak-pmii-ajak-kawal -pemilu (Senin, 14 Nopember 2016, 09.13).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara berurutan akan dijelaskan secara sekilas profil calon yang direkomendasikan sebagai DPD tersebut.

Kiai Hasib Wahab adalah Pengasuh Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kiai Hasib adalah salah satu putra kiai pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah. Sebagaimana jamak diketahui, Pesantren Tambak Beras menjadi pesantren di Jombang Jawa Timur, yang tak terpisahkan dalam sejarah NU selain Pesantren Tebu Ireng dengan *Hadratussyaikh* Hasyim Asy'ari-nya dan Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang dengan Kiai Bisri Syansuri.

Sementara Ainul Yakin adalah salah satu pengurus PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Provinsi Jawa Timur. ISNU adalah satu badan otonom NU yang befungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.[34]

Tiga perempuan yang mendapat rekomendasi dari PWNU Jawa Timur masing-masing masih menjabat dan sudah demisioner dalam kepengurusan badan otonom NU. Rinciannya Istibsjarah dan Dwi Astutik sebagai pengurus PW Muslimat NU Provinsi Jawa Timur dan Khodijatul Qodriah mantan pengurus PW Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Provinsi Jawa timur.

Sebagai catatan, Muslimat NU adalah salah satu badan otonom NU yang befungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok tertentu dengan berbasis usia (perempuan di atas 40 tahun). Sementara IPPNU pada kelompok tertentu dengan berbasis pada pelajar dan santri perempuan maksimal berusia 30 tahun.[35]

---

[34]Tim Revisi POA PWNU Jawa Timur, *Pedoman Organisasi*... 101.
[35]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait relasi antara PWNU Jawa Timur dan konstelasi pileg 2014 ini, Kiai Navis menuturkan:[36]

> "Untuk DPD memang ada rekomendasi. Hal ini absah, sebab secara personal, bukan partai politik. Alasannya lebih pada tidak berasal dari partai dan mewakili daerah".

Rekomendasi dari PWNU Jawa Timur ini, praktis dapat menjadi pendongkrak suara calon DPD yang mendapat rekomendasi. Hal ini mengingat Jawa Timur sebagai lumbung suara nahdliyyin. Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Shonhaji. Bahwa PWNU Jawa Timur memang memberikan rekomendasi kepada kader-kader NU yang layak untuk duduk di kursi DPD. Prof. Shonhaji menuturkan:[37]

> "Mereka kan warga NU dan layak untuk menjadi anggota DPD. Tidak punya cacat, misalnya. Itu *kan* diperlukan keterangan seperti itu. Informasi seperti itu. Jadi tidak ada cacat hukum, kesalahan yang berarti begitu. Kemudian dia punya kemampuan dan layak untuk menjadi anggota DPD".

Prof. Shonhaji melanjutkan bahwa rekomendasi dari PWNU Jawa Timur tersebut berbentuk surat. Dalam surat itu berisi rekomendasi bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam surat adalah orang yang layak dipilih menjadi anggota DPD. Tetapi tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk memilihnya. Prof. Shonhaji menyebut:[38]

> "...kemudian PWNU memberi rekomendasi, ya mereka memang warga NU dan mereka itu layak untuk menjadi anggota DPD. Soal masyarakat memilih atau tidak, itu terserah kepada masyarakat. Siapa yang dipilih, kemudian mereka mau memilih atau tidak. Semua tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk memilih mereka. Jadi PWNU hanya sekedar menginformasikan".

Terkait proses lahirnya rekomendasi itu, Prof. Shonhaji menjelaskan bahwa kader yang bersangkutan meminta kepada PWNU Jawa Timur. Kader NU yang bersangkutan tersebut menunjukkan diri bahwa ia adalah aktivis di NU, atau

---

[36]Kiai Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2016.
[37]Prof. Shonhaji, *Wawancara*, Surabaya, 09 Nopember 2016.
[38]Prof. Shonhaji, *Wawancara*, Surabaya, 09 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang diketahui bahwa kader yang bersangkutan adalah aktivis di NU. Baik aktivis di NU sendiri atau di badan otonom NU, seperti Muslimat NU atau Fatayat NU. Kemudian pihak PWNU mengeluarkan rekomendasi bahwa kader yang bersangkutan memang kader NU dan layak untuk dipilih.

Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh PWNU tersebut pada akhirnya diserahkan kepada kader yang bersangkutan untuk ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ia mendapat rekomendasi. Prof. Shonhaji menuturkan:[39]

> "Surat itu *kan* ya diserahkan kepada yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan yang mencalonkan diri itu, memang ini sudah megang rekomendasi. Itu kemudian ditunjukkan kepada warga masyarakat bahwa beliau itu memang betul-betul warga NU dan dianggap layak untuk dipilih menjadi DPD. Jadi diserahkan langsung ke yang bersangkutan".

Pada posisi ini semakin meneguhkan adanya relasi antara PWNU Jawa Timur dengan politik. Relasi ini berbentuk relasi non-institusi melalui kiai-kiai struktural PWNU Jawa Timur tatkala turut andil dalam konstestasi pilpres 2004, sementara relasi kedua berbentuk institusi melalui surat rekomendasi yang dikeluarkam oleh PWNU Jawa Timur atas lima calon DPD.

B. Proses Terbentuknya Relasi Kuasa Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Politik Pasca-Reformasi

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa ada relasi antara NU Jawa Timur dengan pasangan Mega-Hasyim dan calon DPD yang mendapat rekomendasi. Potret relasi ini akan ditelaah menggunakan kerangka teori pilihan rasional Patrick Baert dan teori politik Jawa Ben Anderson guna mengetahui bagaimana proses terbentuknya relasi tersebut.

Secara definitif, Patrick Baert memberikan definisi teori pilihan rasional sebagai suatu teori sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku politik dan

[39]Prof. Shonhaji, *Wawancara*, Surabaya, 09 Nopember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial dengan mengasumsikan bahwa seseorang bertindak secara rasional[40]. Baert dan beberapa teoritis lain menjadikan beberapa asumsi sebagai dasar teori pilihan rasional. Asumsi pertama adalah intensionalitas, kedua rasionalitas, ketiga kondisi antara ketidakpastian dan risiko dan keempat perbedaan antara pilihan parametrik dan strategis.

Berpijak pada hal ini, dalam proses terbentuknya relasi, dalam arti kenapa bisa terbentuk, dalam kacamata Baert, sebab NU Jawa Timur mempunyai maksud untuk memenangkan pasangan Mega-Hasyim dan calon DPD yang berkelindan dengan kepercayaan/ajaran tentang politik bahwa politik adalah sarana merealisasikan ajaran agama. Begitujuga kepercayaan/ajaran tentang aktor politik, hubungan kiai dengan politik, khittah NU dan cara berkhidmah kader NU yang terjun ke gelanggang politik praktis, sebagaimana dipaparkan di muka. Maksud pemenangan ini membawa NU Jawa Timur berada pada posisi *suboptimality*.

Posisi *suboptimality* meniscayakan adanya asumsi bahwa lawan akan menggunakan strategi sama, di sisi lain juga disadari akan mendapat keuntungan minimal jika menggunakan strategi lain. Hal ini dapat diterjemahkan dengan kiprah NU Jawa Timur yang menggunakan sumber daya NU dalam pemenangan Mega-Hasyim dan calon DPD. Selain intensionalitas, ditunjang pula dengan kerja rasionalitas, di mana kalkulasi dilakukan untuk menentukan bagaimana perjalanan pasangan Mega-Hasyim dan juga calon DPD.

Pengumpulan informasi untuk memperkuat keyakinan NU Jawa Timur adalah poin penting agar strategi pemenangan yang dilakukan menjadi rasional.

[40] Wirawan, *Teori-teori Sosial*... 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa pemimpin perempuan haram[41] yang dimunculkan pihak lawan, di-*counter* dengan "Deklarasi Madinah". Sementara rekomendasi calon DPD, dapat dibaca sebagai alat agar aspirasi masyarakat Jawa Timur yang mayoritas nahdliyyin dapat terwakili di pusat. Mengingat DPD punya fungsi penting berupa fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan.

Tak hanya intesnsionalitas dan rasionalitas, dalam kacamata rasional Baert, siasat pada kondisi penuh resiko berupa ancaman *ukhuwwah nahdliyyah* disiasati dengan strategi komunikasi bahwa kondisi yang terjadi akan menempa NU menjadi dewasa dalam berpolitik.[42] Termasuk pula dalam hal rekomendasi. Sebagaimana dituturkan Prof. Shonhaji, tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mempertanyakan apakah mereka yang direkomendasi benar-benar warga NU[43]. Atas hal ini penelaahan telah dilakukan dan memang yang direkomendasi adalah kader dan aktivis NU, baik di NU sendiri atau badan otonom.

Kerangka rasional Baert, pada pilihan strategis yang menghendaki bahwa sebelum menentukan pilihan harus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang lain, terlihat dari upaya taktis yang dilakukan NU Jawa Timur. Baik *content* majalah *AULA* edisi No. 07 Tahun XXVI Juli 2004, atau rekomendasi atas DPD yang bisa mewakili aspirasi masyarakat nahdliyyin Jawa Timur ke pusat, yang dengan ini secara praktis (dilihat melalui dilema tahanan)

---

[41]Sebagai catatan, Siradj merekam bagaimana dinamika yang terjadi di internal NU dari masa ke masa terkait keabsahan perempuan menjadi pemimpin. Bahkan secara khusus, masalah perempuan ini dibahas dalam satu bab. Lihat Said Aqil Siradj, *Tasawuf sebagai*... 245-251.

[42]Detik, "PWNU jatim: Hasyim Hanya Harus Non-Aktif Saat Kampanye" http://news.detik.com/berita/155641/pwnu-jatim-hasyim-hanya-harus-nonaktif-saat-kampanye (Rabu, 09 Nopember 2016, 21.08).

[43]Prof. Shonhaji, *Wawancara*, Surabaya, 09 Nopember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU Jawa Timur akan menggunakan sumber daya NU untuk merealisasikan maksud. Sebab tidak menutup kemungkinan kandidat lain akan turut menggunakan sumber daya NU, sehingga NU Jawa Timur mengambil keputusan memaksimalkan sumber daya NU yang dimiliki.

Secara aplikatif, terbentuknya relasi ini dapat dibaca melalui teori permainan. Bahwa kehadiran teori permainan mencoba untuk mengulas dan memprediksi strategi-strategi pemain di mana mereka bertindak secara rasional berdasar pada informasi yang diperoleh. Pada teori permainan nonkooperatif (strategis), Baert mencontohkan melalui dilema tahanan. Berikut penjelasannya.

Di dalam kontestasi pilpres 2004 dan pileg 2014, dari sudut NU Jawa Timur, secara sederhana terdapat dua pihak. Pertama menggunakan sumber daya NU, kedua tidak menggunakan. Apabila dalam kontestasi, NU Jawa Timur menggunakan sumber daya NU, sementara lawan tidak maka potensi menang NU Jawa Timur besar. Apabila NU Jawa Timur menggunakan sumber daya NU, sementara lawan juga menggunakan sumber daya NU maka potensi menang kecil. Apabila sama-sama tidak menggunakan maka berada pada kondisi tidak terprediksi. Tabel di bawah ini mencoba untuk menggambarkan rincian tersebut.

NU Jawa Timur	Lawan			
	Tidak Menggunakan Sumber Daya NU		Menggunakan Sumber Daya NU	
Tidak Menggunakan Sumber Daya NU	3	3	2	1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menggunakan Sumber Daya NU	1	2	2	2
	NU Jawa Timur	Lawan	NU Jawa Timur	Lawan

Catatan :

Pay-off[44] : 1 (potensi menang besar), 2 (potensi menang kecil), 3 (tidak terprediksi)

Baris : NU Jawa Timur dan Kolom : Lawan

Perhitungannya adalah tatkala NU Jawa Timur menggunakan sumber daya NU, sementara lawan juga menggunakan, maka skor yang ditulis adalah sama-sama 2. Jika NU Jawa Timur menggunakan dan lawan tidak maka NU Jawa Timu mendapat skor 1 dan lawan mendapat skor 2. Jika NU Jawa Timur tidak menggunakan sumber daya NU, sementara lawan juga tidak maka keduanya mendapat skor 3.

Hal lain yang menyebabkan terjadinya relasi adalah kultur Jawa yang melingkupi Jawa Timur. Meskipun tidak sepenuhnya.[45] Dalam pandangan Anderson, paduan Islam-Jawa yang menjadi corak NU ini, pada gilirannya melahirkan budaya patrimonial juga, di mana kiai NU berperan sebagai patron

[44] *Pay-off* adalah nomor tentang seberapa hasil yang diinginkan pemain.

[45]Teori Politik Jawa Ben Anderson memotret gagasan politik Jawa tradisional sebelum masuknya kolonialisme. Sementara dalam penelitian ini, Jawa yang dimaksud adalah Jawa pasca-kemerdekaan (kurun waktu 2004-2014). Meski demikian, penggunaan Teori Politik Jawa ini sangat relevan. Sebab, sebagaimana dipaparkan Anderson, Teori Politik Jawa ini menjadi langkah untuk memahami kondisi politik Jawa era kini. Lihat Ben Anderson, *Kuasa Kata*... 42-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan masyarakat sebagai klien. Paduan Islam-Jawa yang dipelihara NU berkelindan dengan kekharismatikan kiai, konsep kuasa dan juga laku tapa.

Posisi NU Jawa Timur dengan kiai struktural-nya mempunyai daya pikat yang luar biasa bagi masyarakat. Para kiai struktural NU Jawa Timur adalah sosok kharismatik. Dalam pandangan Anderson, konsepsi kharismatik didapatkan dari gagasan yang berkesuaian dengan konsepsi Jawa tentang Kuasa.[46]

Konsepsi kekuasaan Jawa berintikan bahwa kekuasaan adalah kenyataan yang eksistensial. Kekuasaanya bersifat ilahiyah. Pun ada konsepsi bahwa seluruh kekuasaan sama jenisnya dan berasal dari sumber yang sama. Kuantitas kekuasaan tidak berubah, dan tidak patut mempertanyakan kekuasaan (yang diperoleh) absah atau tidak. Hal yang pasti adalah kekuasaan itu ada.

Kondisi politik Jawa era pasca-reformasi yang menempatkan kharisma sebagai bagian yang tak bisa dilepaskan dari politik, bisa dilacak pada unsur ilahiyah dalam Kuasa Jawa. Kekuasaan yang sifatnya ilahiyah ini, menjadikan seseorang akan sangat ditaati. Sebab ia dianggap sebagai titik di mana kuasa itu berasal. Unsur ilahiyah terwujud melalui sosok kiai yang menjadi pemimpin agama, yang dengannya unsur ilahi (ketuhanan) tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Posisi ilahi, pada akhirnya menjadikan masyarakat (pengikut) melekatkan dirinya kepada pemimpin ini. Sehingga berperannya kiai struktural dalam pemenangan Mega-Hasyim akan menjadikan suara masyarakat (pengikut) kiai tersalurkan sesuai dengan apa yang dilakukan kiai. Atas hal ini, maka kemenangan Mega-Hasyim yang diharapkan kiai akan terwujud. Hal ini juga terjadi dalam rekomendasi DPD.

---

[46]Ben Anderson, *Kuasa Kata*... 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kultur NU, posisi kiai memang menempati posisi yang tinggi. Halim menyebut, kedudukan kiai tersebut berdasar pada posisi kiai yang dianggap sebagai pewaris nabi. Pada titik ini anggapan yang demikian akan menjadi tali pengikat emosional-religius, terutama bagi masyarakat pedesaan, di mana pondok pesantren dan NU mempunyai akar dan berkembang.[47] Di sisi lain, pola keislaman-Jawa di Jawa Timur yang menyimpan unsur patriomonial semakin mengukuhkan relasi ini.

Terkait cara memperoleh kuasa, Anderson memaparkan ada dua jalur. Ada jalur ortodoks dan jalur heterodoks. Jalur ortodoks dimaksudkan pada sebuah usaha yogaistik dan laku tapa umpama puasa, meditasi, berpangkal seksual dan berbagai tipe 'pengorbanan' lain. Nilai penting dari *laku tapa* yang demikian dimaksudkan semata demi mendapat kuasa. Jalur lain, heterodoks adalah merujuk pada sistem kepercayaan Bhairava, yang mengumbar hawa nafsu untuk mendapatkan kuasa. Pengumbaran nafsu dipercaya sebagai cara menuntaskan gairah-gairah sehigga tujuan akhir konsentrasi guna mendapat kuasa dapat tercapai.

Jalur ortodoks mendapat kesesuaiannya melalui laku tapa yang dijalani masyarakat pesantren. Bahwa di dalam kebiasaan pesantren terdapat laku tapa, meditasi, *riyadhoh* yang dengannya ia akan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Bahkan unsur keilahiahan yang lekat dengan pesantren, ternyata juga lekat dengan politik. Sebagaimana dituturkan Kiai Navis:[48]

> "...Posisi tirakat, *riyadhoh* juga sangat penting. Kalau Pesantren/ Kiai bisa mempengaruhi politik, maka hukumnya wajib. Begitu pula sebaliknya.

---

[47]Abdul Halim, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama*, 218.
[48]Kiai Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya tirakat dan *riyadhoh*, dalam keilmuan Islam dikenal pula istilah istikhoroh. Istikhoroh adalah suatu upaya untuk meminta petunjuk ilah (Allah) tatkala hendak menentukan sesuatu. Termasuk pilihan politik. Kiai Navis juga menjelaskan hal ini:[49]

> "Posisi istikhoroh sangat besar dalam menentukan pilihan politik. Istikhoroh menjadi panduan untuk menentukan langkah-langkah kedepannya. *Maa khoba manisytasyaro wa maa nadima manisytasyaro*.[50]

Penjelasan ini semakin menegaskan bahwa unsur Jawa menjadi unsur penting dalam proses terbentuknya relasi kuasa antara NU Jawa Timur dan pasangan Mega-Hasyim, pun dalam rekomendasi atas calon DPD pada pileg tahun 2014. Sampai di sini nampak budaya politik yang berkembang di Jawa Timur. Budaya politik yang dimaksud adalah patrimonialisme. Weber menyebut bahwa patrimonialisme merupakan pola relasi kekuasaan tradisional antara seorang patron dan *client* yang menunjukkan adanya "ketaatan terhadap otoritas pribadi yang dia nikmati berpijak pada status tradisional". Ada loyalitas individu yang dikembangbiakan melalui proses pendidikan.[51]

Di sisi lain, ini juga menegaskan apa yang disebut Hilmy sebagai peran politik pesantren. Bahwa peran pesantren dalam konfigurasi politik berkutat pada dua hal; pertama, pesantren sebagai basis *vote-getter* bagi para kandidat. Kedua, pesantren menyediakan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan di pos-pos politik baik di legislatif maupun eksekutif.[52]

---

[49]Kiai Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2016.
[50]Kalimat ini bermakna "Tidak akan pernah kecewa bagi seseorang yang istikhoroh, tidak akan menyesal orang musyawarah".
[51]Max Weber & Talcott Parsons, *The Theory of Social and Economic Organization* (Chicago: Free Press, 1968), 341; Masdar hilmy, *Islam Politik dan*... 164-165.
[52]Masdar hilmy, *Islam Politik dan*... 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua kerangka ini (baca: kerangka pilihan rasional dan politik Jawa) telah menjelaskan bagaimana relasi NU Jawa Timur baik relasi non-institusi maupun institusi dengan politik bisa terbentuk. Relasi tersebut bisa terbentuk sebab rasionalitas NU Jawa Timur ditopang dengan kultur Jawa yang melingkupi Jawa Timur. Atau bisa disebut, terbentuk sebab sisi rasional dan kultural.

C. Prospek Relasi Kuasa NU dan Politik dalam Suksesi Kepemimpinan Politik ke Depan

Berkenaan dengan prospek relasi kuasa antara NU dan politik dalam suksesi kepemimpinan politik ke depan, sebagaimana paparan data di muka, secara eksplisit menyampaikan pesan bahwa relasi akan tetap muncul. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana pemaknaan (kembali ke) khittah. Sebagai informasi, bahwa khittah inilah yang menjadikan NU secara organisatoris tidak (lagi) terlibat politik praktis.

Terkait khittah ini, nyatanya NU tidaklah anti politik, tetapi justru NU harus produktif mendekati semua kepentingan politik untuk kemaslahatan. Kiai Mutawakkil menuturkan:[53]

> "Pengertian Khittah 26 itu bukan khittah 26 yang pasif dalam politik, namun khittah yang produktif. Artinya NU secara kelembagaan tidak boleh terikat dengan salah satu kekuatan politik. Tetapi NU harus melakukan tindakan produktif yang melahirkan kemaslahatan untuk semuanya kepada semua partisipan-partisipan politik".

Bahkan dengan khittah, NU harus berpartisipasi aktif dalam menyukseskan hajatan politik.[54] Tak hanya itu saja, pemaknaan politik sebagai sarana merealisasikan tujuan agama, kader NU yang terjun ke politik praktis harus

[53]Kiai Mutawakkil Alallah, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2016 .
[54]Abdul Halim, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama*, 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap berkhidmah, membuka ruang terjadinya relasi. Bahkan dalam hal ini, Kiai Mutawakkil berkomentar:[55]

> "Kalau ada politisi dari kader-kader kita yang mau berjuang melalui dunia politik, kemudian meminta restu, meminta saran, kepada tokoh-tokoh NU itu yang memang seharusnya. Supaya diberikan pencerahan, supaya ada *controlling system* didalam menjalankan profesinya, didalam menjalankan langkah-langkah politiknya. Bisa dikatakan politik putih-lah, bukan politik hitam. Ketika kampanye, kampanye sehat-lah, sebab jual program bukan *black campaign*. Jadi yang dimaksud dengan politik dalam konteks khittah 26 bukan NU ditengah-tengah diam, pasif, tapi produktif mendekati semua untuk kepentingan umat".

Apabila ditilik dari sisi kultural, paduan Islam-Jawa (kultur dominan di Jawa Timur) dalam prospek relasi ke depan, mendapati legitimasi. Dalam hal ini paduan Isalam-Jawa yang menyimpan budaya patrimonialisme, sebagaimana dituturkan Anderson,[56] masih tetap ada dalam tubuh NU. Fakta ini juga menjadi faktor lain yang tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan prospek relasi. Harus diakui bahwa hubungan kiai-santri dalam tubuh NU sangatlah dijaga.

Menurut penuturan Halim, dalam komunitas NU, kiai menempati kedudukan yang sangat mulia sebab dianggap sebagai pewaris nabi. Posisi kiai ini menjadi tali pengikat emosional-religius dengan masyarakat, terutama di daerah di mana pesantren NU berkembang.[57] Lantas, kita bisa melihat bahwa pesantren-kiai tidak hanya berurusan dengan sosial-keagamaan, tetapi juga berurusan dengan politik seiring kran kebebasan politik yang terbuka. Dalam beberapa kontestasi, kiai tidak lagi menjadi makelar budaya, tetapi juga menjadi makelar politik, bahkan aktor politik.

Halim menuturkan, pergeseran ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kiai memosisikan diri secara fungsional sesuai dengan dinamika sosio-

---

[55]Kiai Mutawakkil Alallah, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2016 .
[56]Ben Anderson, *Kuasa Kata…* 147-149.
[57]Abdul Halim, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama*, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kultural masyarakat. Kedua, berkelindan dengan pemaknaan *Ahlussunnah wal jamaah* (sebagai basis teologis NU). Dua hal ini pada gilirannya membawa kiai pada dua kondisi, yakni memperluas cakupan dakwah, sementara di sisi lain (juga) menurunkan dan mengurangi kharisma kiai sebab terjebak dalam intrik politik dan kepentingan yang bersifat pragmatis.[58]

Di sisi lain, fakta akan peran pesantren dalam konfigurasi politik yang masih berkutat pada dua hal; yakni sebagai basis *vote-getter* bagi para kandidat dan penyedia sumber daya manusia untuk mengisi jabatan di pos-pos politik[59] juga menjadi hal vital dalam prospek relasi. Pesantren masih belum beranjak dari peran sebagai lumbung suara para kandidat dan penyedia tokoh yang akan mengisi jabatan politik di pos tertentu.

Secara rinci, prospek relasi NU Jawa Timur dan politik akan tetap muncul dikarenakan; pertama, kepercayaan/ajaran NU, seperti pemaknaan politik, hubungan kiai dengan politik, khittah NU dan cara berkhidmah kader NU yang terjun ke gelanggang politik praktis. Kedua, "terlembaganya" paduan Islam-Jawa dan terpeliharanya "ajaran-ajaran" tentang ketaatan kepada kiai, termasuk dalam pilihan politik melalui kiai NU.[60] Ketiga, peran pesantren yang masih belum beranjak dari *vote-getter* dan penyedia sumber daya manusia untuk mengisi pos politik.

---

[58]Ibid., 325.
[59]Masdar hilmy, *Islam Politik dan...* 180.
[60]Dalam hal ini bisa dilihat peran kiai seperti dalam buku karya Kiai Ushfuri Anshor berjudul *Belum Terlambat sebelum Kiamat*, diterbitkan di Jakarta oleh DPP PKB pada tahun 2012. Di sampul buku tertulis "bukan kampanye, tetapi menjelaskan tentang hukum kewajiban warga NU pilih PKB".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id